

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP  
EFEKTIVITAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**19**

**Eryasi Daryati**  
**Universitas Muara Bungo**  
**(Naskah diterima: 1 Januari 2024, disetujui: 28 Januari 2024)**

***Abstract***

*The purpose of this study was to find out how the contribution of Regional Original Income sourced from Regional Taxes, Regional Levies, BUMD Profits, and other legitimate PAD to the Effectiveness of Bungo Regency Regional Revenues from 2015 to 2019. The data obtained were sourced from the Realization Report. Bungo Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) from 2015-2019. The data analysis technique uses a contribution analysis approach to the regional revenue budget by comparing PAD revenues to the APBD. Contribution analysis is an analytical tool used to determine the extent to which Regional Original Income (PAD) can be obtained from local tax revenues, regional levies, the results of separated regional wealth management, and other legitimate PAD revenues to regional revenue receipts. The results of the study show that: (1) The contribution of PAD to Bungo Regency Regional Income in 2015 to 2019 respectively: in 2015 of 9.95%, 2016 of 9.90%, 2017 of 14.30%, 2018 by 10.61% and in 2019 by 10.41%. (2) The contribution of PAD components to Bungo Regency's total PAD from 2015 to 2019 are respectively: 25.96% local taxes, 3.01% regional levies, 3.33% separated regional wealth management results, and others -Other legitimate PAD is 67.69%. (3) The contribution of the PAD component to Bungo Regency Regional Revenue from 2015 to 2019 are respectively: regional taxes of 2.88%, regional retributions of 0.72%, the results of separated regional wealth management of 0.37%, and so on. other legitimate PAD is 6.26%.*

**Keywords:** contribution of regional original income, effectiveness of regional income

***Abstrak***

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, serta Lain-lain PAD yang sah terhadap Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Data yang didapat bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo dari tahun 2015-2019. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis kontribusi terhadap anggaran pendapatan daerah dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap APBD. Analisis kontribusi merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan PAD yang sah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo tahun

2015 sampai dengan 2019 masing-masing: tahun 2015 sebesar 9,95%, tahun 2016 sebesar 9,90%, tahun 2017 sebesar 14,30%, tahun 2018 sebesar 10,61% dan tahun 2019 sebesar 10,41%. (2) Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Bungo dari tahun 2015 sampai dengan 2019 masing-masing: pajak daerah sebesar 25,96%, retribusi daerah 3,01%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,33%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 67,69%. (3) Kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo tahun 2015 sampai 2019 masing-masing: pajak daerah sebesar 2,88%, retribusi daerah sebesar 0,72%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,37%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 6,26%.

**Kata Kunci:** kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas pendapatan Daerah

## I. PENDAHULUAN

**K**emandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapa-tan asli daerah (PAD) dibanding-kan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Pemda seba-gai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelaya-nan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Kewenangan untuk memanfaatkan keuangan sendiri

dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Melalui otonomi daerah diharap mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus nyata dan bertanggung jawab dalam menangani tugas pemerintahan, wewenang dan kewajibannya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian otonomi dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas

wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah melalui lembaga daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD.

Pemerintahan Kabupaten Bungo merupakan salah satu daerah di daerah Provinsi Jambi yang memiliki banyak potensi dalam mendukung perkembangan ekonomi yang

cukup pesat. Kabupaten Bungo juga memiliki masyarakat dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan, sehingga seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi di masyarakat dan semakin berkembangnya potensi yang dimiliki kabupaten Bungo, dapat mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatnya perekonomian masyarakat. Komponen Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah.

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Daerah		Persentase
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2015	117.462.728.774,50	105.277.046.266,24	1.206.398.535.226,50	1.058.025.567.065,20	10%
2016	123.883.203.009,90	114.818.287.091,48	1.211.134.556.059,76	1.160.252.130.294,50	10%
2017	172.891.533.006,19	183.133.678.700,00	1.289.830.094.925,07	1.281.019.687.622,01	14%
2018	134.362.845.635,08	133.848.451.058,56	1.318.380.873.086,52	1.261.739.448.135,45	11%
2019	186.265.957.363,05	140.327.484.503,26	1.577.550.741.555,77	1.349.860.685.847,73	10%

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas anggaran dan realisasi PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo menunjukan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 penerimaan PAD rata-rata pertahun realisasi sebesar 10% apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah, hanya pada ta-

hun 2017 terdapat peningkatan PAD yaitu sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1.1 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelegaraan Pemerintah Daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya se-gala bentuk kekayaan yang berhubungan de-nan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 23 Tahun 2014). Menurut UU No. 33 Ta-hun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 66 Ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peratu-ran perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab de-nan memperlihatkan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara umum, konsep ekonomis, efisien, efektif (*value for money*), transparan, dan akuntabilitas (tang-gung jawab) publik merupakan tiga dari dela-pan karakteristik tata kelola yang baik (*good governance*) versi United Nations Develop-ment Programme (UNDP) yang dapat diperan-kan akuntansi sektor publik (Mardias-mo,2002).

### **2.1.2 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegia-tan-kegiatan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penam-bahan nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui seba-gai sumber penerimaan daerah berdasarkan dua dasar pengakuan yaitu dasar kas dan atau dasar akrual yang dinyatakan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah bahwa:

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara atau benda-hara umum daerah atau oleh entitas peme-rintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pe-merintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
2. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak pe-merintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan *netto*. Basis akrual merupa-kan basis yang ditetapkan oleh SAP untuk mengakui pendapatan dan belanja (Halim, 2008).

Pendapatan merupakan bagian dari La-poran Realisasi Anggaran (LRA) yang meru-pakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi ten-tang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

### **2.1.3 Sumber Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah, antara lain terdiri atas :

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

**2. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah**

Pendapatan daerah yang lain dan sah berasal dari sumber-sumber antara lain, hasil penjualan asset tetap daerah, jasa giro, dan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah, atas dasar kesekrelaan dengan persetujuan pihak DPRD.

**2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah-

kan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 jenis-jenis PAD adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak Daerah
- 2. Retribusi Daerah
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

**2.1.5 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Efektivitas Pendapatan Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Kontribusi adalah Sumbangan. Sedangkan Menurut Kamus Ekonomi T. Guritmo (1992) dalam Reflikasi Elizabeth Mbembe (2018). Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan menghitung rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**III. METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, berupa Pendapatan Daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Bungo. Sumber data adalah LRA Kabupaten Bungo periode tahun 2015 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo, antara lain :

- a. Data realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2015 sampai dengan 2019.
- b. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2015 sampai dengan 2019.
- c. Data mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo

### **3.1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan melihat, mempelajari dan meneliti kegiatan melalui dokumen dan data yang digunakan.

### **3.2. Teknik Analisis Data**

Data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kontribusi terhadap anggaran pendapatan daerah dengan membandingkan

penerimaan PAD terhadap APBD. Untuk mengetahui kontribusi PAD digunakan rumus sebagai berikut:

- a. Analisis Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Bungo. Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan: X : Jumlah kontribusi yang diberikan

- b. Analisis Kontribusi Komponen PAD terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Bungo.

Analisis kontribusi komponen PAD suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan PAD yang sah terhadap PAD. (Baihaqi, 2011). Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah kontribusi yang diberikan  
Py : Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

c. Analisis Kontribusi Komponen PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bungo.

Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Baihaqi, 2011).

$$X = \frac{Py}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah kontribusi yang diberikan  
Py : Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau Lain-lain PAD yang sah.

#### IV. HASIL PENELITIAN

Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kontribusi terhadap anggaran pendapatan daerah dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap APBD. Selanjutnya beberapa analisis yang dilakukan yaitu:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bungo. Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.8 Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo**

**Periode 2015-2019**

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
2015	105.277.046.266,24	1.058.025.564.065,24	9,95%
2016	114.818.287.091,48	1.160.252.130.294,50	9,90%
2017	183.133.678.700,00	1.281.019.687.622,01	14,30%
2018	133.848.451.058,56	1.261.739.448.135,45	10,61%
2019	140.327.484.503,26	1.349.860.685.847,73	10,40%

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 :

a. Pada tahun anggaran 2015 PAD memberikan kontribusi sebesar Rp105.277.046.266,24 terhadap pendapatan daerah sebesar

- Rp1.058.025.564.065,24. atau sebesar 9.95%. Pada tahun 2015 P A D mengalami penurunan sebesar 0,05% jika dibandingkan total kontribusi PAD pada tahun 2016 sehingga kontribusi PAD pada tahun 2016 menurun dari 9.95% menjadi 9.90% tidak sejalan dengan peningkatan realisasi PAD.
- b. Pada tahun anggaran 2016 PAD memberikan kontribusi sebesar Rp114.818.287.091,48 terhadap pendapatan daerah sebesar Rp1.160.252.130.294,50. atau sebesar 9.90%. Padatahun2016 P A D mengalami penurunan sebesar 0,05% jika dibandingkan total kontribusi PAD pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,40%. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp Rp114.818.287.091,48 mengalami peningkatan sebesar Rp68.315.391.608,52 naik sebesar 4.40% yaitu menjadi sebesar Rp183.133.678.700,00. sehingga kontribusi PAD pada tahun 2017 naik dari 9.90% menjadi 14.30% sejalan dengan peningkatan realisasi PAD Begitu juga dengan pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp1.160.252.130.294,50 pada tahun anggaran 2016 menjadi Rp1.281.019.687.622,01 pada tahun 2017 kenaikan sebesar Rp120.767.557.327,51.
- c. Pada tahun anggaran 2017 PAD memberikan kontribusi sebesar Rp183.133.678.700,00 terhadap pendapatan daerah sebesar Rp1.281.019.687.622,01. atau sebesar 14.30%. Pada tahun 2017 P A D mengalami kenaikan sebesar 4,40% jika dibandingkan total kontribusi PAD pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 3,69%. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp Rp183.133.678.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp49.285.227.641,44 turun sebesar 3.69% yaitu menjadi sebesar Rp133.848.451.058,56. sehingga kontribusi PAD pada tahun 2018 turun dari 14.30% menjadi 10.61% hal ini tidak sejalan dengan peningkatan realisasi PAD. Begitu juga dengan pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp1.281.019.687.622,01 pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp1.261.739.448.135,41 pada tahun 2018 turun sebesar Rp19.280.239.486,56.
- d. Pada tahun anggaran 2018 PAD memberikan kontribusi sebesar Rp133.848.451.058,56 terhadap pendapatan daerah sebesar Rp1.261.739.448.135,41. atau sebesar 10.61%. Pada tahun 2018 P A D mengalami penurunan sebesar 0,21% jika dibandingkan total kontribusi PAD pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21%.

Namun pada tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp133.848.451.058,56 mengalami peningkatan sebesar Rp6.479.033.444,70 sehingga realisasi PAD pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar Rp140.327.484.503,26. Akan tetapi secara total kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2018 turun dari 10.61% menjadi 10.40% tidak sejalan dengan peningkatan realisasi PAD. Begitu juga dengan pendapatan daerah secara realisasi mengalami kenaikan dari Rp1.261.739.448.135,40 pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp1.349.860.685.847,73 pada tahun 2019 ke naikan sebesar Rp88.121.237.712,28. Akan tetapi secara total kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar 0,21.

e. Jumlah kontribusi yang diberikan PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2015 sampai 2019 secara keseluruhan sebesar 11,09% atau rata-rata sebesar 11.03%.

Dengan demikian PAD yang dipungut di Kabupaten Bungo mempunyai kontribusi tidak cukup besar terhadap Pendapatan Daerah.

2. Analisis Kontribusi Komponen PAD terhadap Total Penerimaan PAD di Kabupaten Bungo. Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD terhadap PAD melalui beberapa analisis yaitu:

a. Pajak daerah terhadap total PAD

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X:Jumlah kontribusi yang diberikan

Py: jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah

**Tabel 4.9 Kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD Kabupaten Bungo**

Tahun	Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2015	105.277.046.266,24	25.989.450.690,00	24,69%
2016	114.818.287.091,48	27.553.390.324,50	24,00%
2017	183.133.678.700,00	45.389.522.996,00	24,78%
2018	133.848.451.058,56	38.052.122.570,00	28,43%
2019	140.327.484.503,26	38.886.513.374,76	27,71%

b. Retribusi Daerah terhadap totalPAD

Rumus yang digunakan untuk menghi-

tung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X:Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah penerimaan dari sektor retribusi daerah

**Tabel 4.10 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total PAD Kabupaten Bungo**

Tahun	Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Retribusi Daerah	Kontribusi (%)
2015	105.277.046.266,24	4.628.572.337,00	4,40%
2016	114.818.287.091,48	3.796.149.293,00	3,31%
2017	183.133.678.700,00	3.794.376.569,00	2,07%
2018	133.848.451.058,56	3.808.355.419,00	2,85%
2019	140.327.484.503,26	4.395.758.506,00	3,13%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X:Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : jumlah penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Tabel 4.11 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap total PAD Kabupaten Bungo**

Tahun	Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Kontribusi (%)
2015	105.277.046.266,24	4.074.649.176,10	3,87%
2016	114.818.287.091,48	3.810.734.153,28	3,32%
2017	183.133.678.700,00	4.230.472.927,41	2,31%
2018	133.848.451.058,56	4.408.281.714,08	3,29%
2019	140.327.484.503,26	6.031.389.351,77	4,30%

d. Lain-lain PAD yang sah terhadap Total PAD

Untuk menghitung Lain-lain PAD yang

sah terhadap total PAD juga digunakan rumus yang sama seperti pada perhitungan komponen PAD lainnya sebagai

berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X:Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : jumlah penerimaan dari sektor

Lain-lain PAD yang Sah

**Tabel 4.12 Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap total PAD Kabupaten**

**Bungo**

Tahun	Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Lain-lain PAD yang Sah	Kontribusi (%)
2015	105.277.046.266,24	70.584.374.063,14	67,05%
2016	114.818.287.091,48	79.658.013.320,70	69,38%
2017	183.133.678.700,00	129.719.306.207,59	70,83%
2018	133.848.451.058,56	87.579.691.355,48	65,43%
2019	140.327.484.503,26	91.013.823.270,73	64,86%

3. Analisis Kontribusi Komponen PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bungo. Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah, melalui beberapa analisis berikut ini:

a. Pajak daerah terhadap total Pendapatan Daerah

Hasil analisis data tentang analisis kontribusi pajak daerah kabupaten Bungo dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2019 dapat dilihat melalui perhitungan berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X:Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : jumlah penerimaan dari sektor pajak daerah terhadap pendapatan daerah :

**Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten**

**Bungo**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Total Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	1.058.025.564.065,24	25.989.450.690,00	2,46%
2016	1.160.252.130.294,50	27.553.390.324,50	2,37%
2017	1.281.019.687.622,01	45.389.522.996,00	3,54%
2018	1.261.739.448.135,45	38.052.122.570,00	3,02%
2019	1.349.860.685.847,73	38.886.513.374,76	2,88%

pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

a. Retribusi Daerah terhadap Total

Pendapatan Daerah

Analisis Kontribusi Pendapatan Daerah dari sektor Retribusi Daerah, digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi

Keterangan:

X:Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : jumlah penerimaan dari sektor retribusi daerah

**Tabel 4.14 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bungo**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Total Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	1.058.025.564.065,24	4.628.572.337,00	0,44%
2016	1.160.252.130.294,50	27.553.390.324,50	2,37%
2017	1.281.019.687.622,01	3.794.376.569,00	0,30%
2018	1.261.739.448.135,45	3.808.355.419,00	0,30%
2019	1.349.860.685.847,73	4.395.758.506,00	0,33%

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Total Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Daerah, dengan rumus:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X:Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : jumlah penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

**Tabel 4.15 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)	Kontribusi (%)
2015	1.058.025.564.065,24	4.074.649.176,10	0,39%
2016	1.160.252.130.294,50	3.796.149.293,00	0,33%
2017	1.281.019.687.622,01	4.230.472.927,41	0,33%

2018	1.261.739.448.135,45	4.408.281.714,08	0,35%
2019	1.349.860.685.847,73	6.031.389.351,77	0,45%

- c. Lain-lain PAD yang sah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah

Untuk menghitung Lain-lain PAD yang sah terhadap penerimaan PAD juga digunakan rumus yang sama seperti pada perhitungan komponen PAD lainnya sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

X: Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : jumlah penerimaan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah.

**Tabel 4.16 Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah**

**Kabupaten Bungo**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Total Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	1.058.025.564.065,24	70.584.374.063,14	6,67%
2016	1.160.252.130.294,50	3.810.734.153,28	0,33%
2017	1.281.019.687.622,01	129.719.306.207,59	10,13%
2018	1.261.739.448.135,45	87.579.691.355,48	6,94%
2019	1.349.860.685.847,73	91.013.823.270,73	6,74%

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Efektivitas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bungo

Kontribusi dalam penelitian ini adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber dari PAD dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri dan terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran. Kontribusi PAD terha-

dap Pendapatan Daerah relatif kecil. Terlihat adanya persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama tahun 2015 sampai 2019.

2. Kontribusi Komponen PAD terhadap Total Penerimaan PAD di Kabupaten Bungo.
- Kontribusi retribusi secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan realisasi retribusi yang fluktatif dari tahun ke tahun. Penurunan tingkat persentase kontribusi tahun 2015 sampai tahun 2019 disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah tidak sebanding

dengan kenaikan nominal PAD secara keseluruhan. Akan tetapi secara keseluruhan besarnya nominal retribusi yang terealisasi selalu mengalami peningkatan.

3. Kontribusi Komponen PAD terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bungo Jika dilihat jumlah kontribusi pajak daerah secara keseluruhan terhadap pendapatan daerah selama periode 2015 sampai 2019 adalah sebesar 2,88% dan rata-rata sebesar 2,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Bungo masih belum mampu dalam hal pendanaan daerah. Pemerintah masih sangat bergantung oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai berbagai kegiatan kepemerintahannya. Pemerintah hendaknya melakukan berbagai terobosan yang lebih dapat menarik perhatian masyarakat agar sadar dan mau membayar pajak. Dengan demikian berangsur-angsur penerimaan dari sektor pajak daerah akan meningkat dan pada akhirnya diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat.

## **V. KESIMPULAN**

1. Kontribusi Pemdapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo tahun 2015 sampai dengan 2019 masing-masing: tahun 2015 sebesar 9,95%, tahun 2016 sebesar 9,90%,

- tahun 2017 sebesar 14,30%, tahun 2018 sebesar 10,61% dan tahun 2019 sebesar 10,41%. Setiap tahun Kontribusi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu besar.
2. Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Bungo dari tahun 2015 sampai dengan 2019 masing-masing: pajak daerah sebesar 25,96%, retribusi daerah 3,01%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,33%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 67,69%. Kontribusi komponen PAD ini angkanya sangat fluktuatif. Meskipun demikian penerimaan kontribusi dari masing-masing komponen semakin besar setiap tahunnya. Kontribusi paling tinggi diperoleh melalui Lain-lain PAD yang Sah sebesar 67,69%, dan paling rendah pada Retribusi daerah sebesar 3,01%.
3. Kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo tahun 2015 sampai 2019 masing-masing: pajak daerah sebesar 2,88%, retribusi daerah sebesar 0,72%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,37%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 6,26%. Jumlah kontribusi yang diberikan masing-

masing komponen masih rendah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi* <http://www.google.com>.
- Halim, Abdul. 2014. *Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah: Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Icuk, Rangga. dan Novelsyah M. 2012. *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2008. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Hak Wewenang dan Kewajiban untuk mengatur/mengurus Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat – Daerah*

Keputusan Menteri dalam Negeri nomor : 13 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Ismathono 2003 *PAD merupakan Keuangan Daerah berasal daripotensi Daerah sendiri dan bersumber dari pajak Daerah retrebusi daerah perusahaan daerah, Dinas daerah dan lain-lain usaha yang sah*

Menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2009 *pajak dan retrebusi daerah yang mana keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah*

Mardiasmo 2011 *pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin*